

ABSTRAK

FEBBY FAUZI KUSUMAPUTRA, E.1710346 “KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SUKABUMI (Studi Kasus Nomor : Pds-01 Cibad/012018)”. Skripsi, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, 2023.

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Pengaturan fungsi Kejaksaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman perlu dikuatkan sebagai landasan kedudukan kelembagaan dan penguatan tugas dan fungsi Kejaksaan.

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tugas dan wewenang jaksa pada tahap penuntutan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kejaksaan. 2) Untuk mendapatkan gambaran/deskripsi penerapan ketentuan tersebut diatas pada Kejaksaan Negeri Sukabumi, khususnya dalam penuntutan tindak pidana korupsi, dan menganalisisnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma/yurisprudensi. Tahap penelitian yuridis normatif, menggunakan studi kepustakaan (penelaahan terhadap literatur). Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka Untuk menyelesaikan Tugas serta fungsi tersebut jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait seperti Polisi, Hakim, KPK karena dalam melakukan kerja sama seperti kasus korupsi agar lebih cepat untuk memberantas tindak pidana korupsi. 2) Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi penyebabnya adalah pelaku yang melakukan korupsi sangat licik dan canggih, penyidik jaksa belum berperan maksimal, dan faktor budaya, moral, gaya hidup yang semakin hari semakin merajalela. Sehingga dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi ada kendala- kendala yang dihadapi oleh jaksa dan walaupun ada kendala tetapi kejaksaan tetap bersemangat menjalankan tugas memberantas tindak pidana korupsi.

Kata Kunci :

Tindak Pidana Korupsi; Kepastian Hukum; Kebijakan Hukum Pidana.

ABSTRACT

FEBBY FAUZI KUSUMAPUTRA, E.1710346 " THE AUTHORITY OF THE PROSECUTOR IN INVESTIGATING CRIMINAL ACTIONS IN VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT AT THE PUBLIC PUBLIC PUBLIC PUBLIC PROSECUTOR (Case Study Number: Pds-01 Cibad/012018). Thesis, Law Study Program, Faculty of Law, Djuanda University, Bogor, 2023.

The Attorney General's Office is a government institution whose function is related to the judicial power that exercises state power in the field of prosecution and other powers based on the law. The Prosecutor's Office in carrying out its functions related to judicial power is carried out independently. The regulation of the functions of the Prosecutor's Office relating to judicial power needs to be strengthened as a basis for institutional standing and strengthening the duties and functions of the Attorney General's Office.

The purposes of this study are: 1) To know and analyze the arrangement of the duties and powers of prosecutors at the prosecution stage according to Law Number 20 of 2021 concerning the Prosecutor's Office. 2) To get an overview/description of the application of the aforementioned provisions to the District Attorney of Sukabumi, particularly in the prosecution of criminal acts of corruption, and to analyze them. The research method used in this study is a normative juridical approach, namely law is conceptualized as norms, rules, principles or dogmas/jurisprudence. The normative juridical research stage uses library research (literature review). In this study, library materials constitute the basic research data which is classified as secondary data. The results of this study are: 1) The prosecutor acts as an investigator and doubles as a public prosecutor in handling corruption. So to complete these tasks and functions the prosecutor must cooperate with other related parties such as the police, judges, KPK because in carrying out cooperation such as corruption cases so that it is faster to eradicate criminal acts of corruption. 2) Factors that become obstacles in the process of investigating criminal acts of corruption are caused by the perpetrators who commit corruption are very cunning and sophisticated, prosecutor investigators have not played a maximum role, and cultural, moral, lifestyle factors are increasingly rampant. So that in the process of investigating criminal acts of corruption there are obstacles faced by prosecutors and even though there are obstacles, the prosecutor's office remains enthusiastic about carrying out the task of eradicating criminal acts of corruption.

Keywords :

Corruption Crime; Legal certainty; Criminal Law Policy.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat tak terhingga serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul: **“KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SUKABUMI (Studi Kasus Nomor : Pds-01 Cibad/012018”**. Skripsi ini diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Martin Roestamy, S.H., M.H., selaku Ketua Pembina Yayasan Amaliah Djuanda dan Chancellor Universitas Djuanda Bogor;
2. Bapak Dr. H. Bambang Widjojanto, S.H., M.Sc., selaku Ketua Umum Yayasan Amaliah Djuanda;
3. Ibu Dr. Hj. R. Siti Pupu Fauziah, M.Pdi., selaku Wakil Ketua Umum Yayasan Amaliah Djuanda;
4. Bapak Prof. Mohamad Ali Fullazaky, Ph.D., selaku Rektor Universitas Djuanda Bogor;

5. Bapak Aal Lukmanul Hakim, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
6. Ibu Dr. Hj. Endeh Suhartini, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor Bidang Kerjasama, PMB dan Pengembangan Bisnis;
7. Bapak Dr. Yudi Wahyudin, S.Pi., M.Si., selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian Inovasi dan Hilirasi;
8. Ibu Dr. Nurwati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Djuanda
9. Ibu Dr. Ani Yumarni, S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Djuanda
10. Bapak R. Djuniarsono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Non Akademik Fakultas Hukum Universitas Djuanda;
11. Ibu R. Yuniar Anisa Ilyanawati, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda
12. Ibu Siti Maryam, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda;
13. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor;
14. Ibu Ika Darmika, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama, yang dengan kemurahan hati telah membimbing dan banyak memberi koreksi selama dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
15. Bapak Dadang Suprijatna, S.H., M.H., sebagai Pembimbing Pendamping, yang dengan kemurahan hati telah membimbing dan banyak memberi koreksi dalam proses penyelesaian Skripsi ini.

16. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor.
17. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor.
18. Teman-teman mahasiswa angkatan 2017 Program Studi Hukum Universitas Djuanda Bogor.
19. Kedua orang tuaku yang selalu mendorong serta memotivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dalam segi bentuk, isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kepada pembaca untuk dapat memberikan pemikiran, kritik maupun saran demi kesempurnaan Skripsi ini.

Semoga penulisan Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum pada khususnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bogor, 25 Juli 2023
Peneliti,

Febby Fauzi Kusuma Putra
E.1710346

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
LEMBAR PERTANGGUNGJAWABAN AKADEMIK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian dan Lokasi Penelitian	29
 BAB II : TINJAUAN UMUM KEJAKSAAN DAN TINDAK PIDANA	
KORUPSI.....	35
A. Kejaksaan	35
1. Pengertian Kejaksaan.....	35
2. Dasar Hukum Kejaksaan.....	37
3. Pengertian Jaksa.....	40
4. Tugas dan Kewenangan Jaksa	41
B. Tindak Pidana Korupsi.....	43
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	43
2. Pengertian Korupsi	44

3.	Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi	45
4.	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi.....	46
5.	Akibat Tindak Pidana Korupsi.....	51
6.	Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan	52
C.	Pengelolaan Keuangan Desa	53
1.	Pengertian Desa dan Dana Desa	53
2.	Dasar Hukum Desa	54
3.	Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa.....	55
4.	Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa	57
5.	Faktor Penyebab Terjadinya Penyimpangan Penggunaan Dana Desa	63
BAB III : PELAKSANAAN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SUKABUMI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA		
66		
A.	Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi.....	66
B.	Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi ...	82
C.	Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi	85
BAB IV: ANALISIS KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA		
105		
A.	Tinjauan Hukum Terhadap Kewenangan Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi	105
B.	Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana korupsi pada pengelolaan keuangan desa berdasarkan Studi Kasus Perkara di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabum	128
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....		
133		

A. Kesimpulan	133
B. Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA	135
LAMPIRAN-LAMPIRAN	